



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG SOETJIANI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **113181**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **890.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **529.500.000**

1. MOTOR, KAWASAKI KAZE ZX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
6. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
7. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000



8. MOBIL, MITSUBISHI KUDA Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp.
43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	523.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	244.442.751
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.187.842.751

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.187.842.751

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYANTANA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 159126

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.886.028

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 742.886.028

III. HUTANG Rp. 67.155.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 675.731.028

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRY PRASEPTIAWAN**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **225352**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/17 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, WARISAN Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.350.001

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.618.746

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 856.968.747

III. HUTANG Rp. 145.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 711.968.747

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDIYAH**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **895545**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 359.000.000**

1. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 64.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/130 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 253.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 230.000.000
2. MOTOR, HONDA ATI1121B01 A/T / SOLO Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 34.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 25.000.000**

Sub Total **Rp. 671.500.000**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 671.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENNY SASWIYANTI**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **218858**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.304.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 546 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 999.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/70 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.700.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 79.882.523

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.476.582.523

III. HUTANG Rp. 68.169.354

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.408.413.169

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.